

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : KHAIRUNNISA

NPM : 1405170462

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : KHAIRUNNISA
NPM : 1405170462
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si)

(IKHSAN ABDULLAH, SE.M.Si)

Pembimbing

(Dr. MUHYARSYAH SE.M.Si)

PANITIA UJIAN

Sekretaris



(D. J. ... SE, MM M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : **KHAIRUNNISA**
N.P.M : **1405170462**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI KEUANGAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHAIRUNNISA
N.P.M : 1405170462
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/03-2018	Perbaiki Hasil Penelitian		
	Perbaiki Deskripsi Data		
	Perbaiki Pembahasan dan Masukan data		
	Perbaiki penulisan sesuai pedoman.		
08/03-2018	perbaiki pembahasan		
	perbaiki penulisan sesuai pedoman		
	Sinkroniskan pembahasan dengan rumusan masalah		
	perbaiki kesimpulan dan saran		
09/03-2018	Perbaiki penulisan sesuai pedoman		
	Perbaiki kesimpulan		

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Khairunnisa

Npm : 1405170462

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada**
Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Kantor Walikota Medan.** dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

D7ADAAFF001104771

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Khairunnisa
Khairunnisa

ABSTRAK

Khairunnisa (1405170462) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012-2016. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012-2016.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data penelitian dianalisis dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Medan masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang kemampuan pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah Kota Medan masih bergantung dengan pemerintah pusat. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah juga masih dibawah standar sehingga Pemerintah Kota Medan tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kharunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beriringkan salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak

Proposal ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan starta satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun proposal ini berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016”**. pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa buat Ayahanda Eddy Makmur.,SH , dan Ibunda Eka Susanti.,SH berkat do'a dan dukungan morilnya yang tiada henti.
2. Saudara saudara ku tercinta Muhammad Anshari Ghosain.,S.Ak dan Muhammad Adlin yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan,SE.,M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE.,M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hannum,SE.,M.si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk menentukan serta memberikan arahan dan bimbingan didalam penulisan proposal ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Biro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam proses penyusunan proposal.
11. Dan Kepada seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2014 C Akuntansi Siang Atas segala Dukungan dan Motivasi yang diberikan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis menyerahkan segalanya, semoga budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis mendapatkan balasan dari Nya. Amin ya Robbal'Alamin.

Medan, Februari 2018

Penulis

KHAIRUNNISA

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Kinerja Keuangan Daerah.....	8
a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	9
b. Pengertian Analisis Keuangan Daerah	10
c. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	11
d. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
f. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
g. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	17
3. Rasio Kemandirian	18
4. Penelitian Terdahulu	20

B. Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Definisi Operasional Variabel	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Sumber dan Jenis Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisi Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Sumber-Sumber Kemandirian Pendapatan Asli Daerah.....	5
TABEL 2.1 Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah	18
TABEL 2.2 Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah.....	19
TABEL 2.3 Penelitian Terdahulu.....	20
TABEL 4.1 Data Keuangan Daerah Kota Medan.....	30
TABEL 4.2 Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah	31
TABEL 4.3 Data Keuangan Daerah Kota Medan.....	33
TABEL 2.4 Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemetaan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Peraturan Perundang tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 Kota Medan memikul tugas yang harus memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Medan sendiri. dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah diperlukan pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntun adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Sumber-sumber Pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa komponen diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah. besarnya jumlah PAD yang diperoleh pemerintah daerah merupakan tolak ukur penilaian kemandirian pemerintahan daerah tersebut.

Dalam operasionalnya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. seiring meningkatnya PAD,

diharapkan tingkat Kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. seharusnya dalam era otonomi peran PAD semakin besar dalam membiayai belanja daerah. fenomena kinerja keuangan yang terjadi pada pemerintah kota medan ialah pada bulan november 2013 memperoleh penghargaan sebagai kota metropolitan paling top atas kinerja penyelenggaraan pemerintah dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan pada bulan Juni 2014 meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan, memberikan gambaran awal bagaimana kinerja pemerintah secara garis besar.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan, beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi fiskal, Rasio Ketergantungan daerah, Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi. Menurut Bisma (2010 hal 77).

Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Halim (2007, hal 233) Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstren dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. hal ini akan terlihat dari tingkat persentase pencapaian dari masing-masing indikator kinerja yg telah ditetapkan.

Dilihat dari data tahun 2015 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebesar 1.489.723.189.088, Anggaran Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 1.794.704.774.012 dan Persentase ketercapaian Kota Medan Pada tahun 2015 senilai 83,01% .

Ditahun 2016 Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan dimana Realisasi Pendapatan Asli Daerahnya sebesar 1.535.309.574.041, Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.884.851.580.562 dan Persentase Ketercapaian Kota Medan hanya 81,46%.

Menurut Halim (2007, hal 128) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100 persen. namun semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

Menurut Gusti Agung (2011, hal 7) “Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai suksesnya atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan”.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan potensi PAD juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kemandirian kota Medan dapat dilihat tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Sumber-Sumber Kemandirian Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain PAD yang sah	Total Pendapatan Daerah
2015	1.489.723.189.088	2.769.321.301.627	0,00	4.259.044.490.715
2016	1.535.309.574.014	2.772.807.342.010	0,00	4.308.116.916.024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan asli daerah bukan saja menjadi indikator penting kemandirian daerah. akan tetapi dapat pula diukur dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Pada tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah karena besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan bahwa masih besarnya pendanaan dari luar dibandingkan pendapatan yang berasal dari dalam daerah.

(Halim,2007, hal 128,) semakin tinggi rasio kemandirian mengandung bahwa arti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Mahmudi dalam suprianto (2013) mengatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam melenggarakan kemandirian.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014). tentang kemandirian dan efektifitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efektivitas sebagai alat analisisnya. daerah otonom kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali dan secara tren kemandirian dari tahun 2005-2011 berada dalam kecendrungan menurun. sedangkan untuk analisis rasio efektifitas masuk dalam kategori keuangan yang sangat efektif secara rata-rata dari tahun 2004-2011 dan tren efektivitas keuangan daerah menunjukkan cenderung naik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2012-2016”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai dengan target yang telah ditetapkan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan membatasi masalah yang diteliti agar tidak menyimpang dari tujuan. Penulis akan membatasi masalah mencakup Analisis Kinerja Keuangan Daerah yang dilihat dari aspek Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian di Pemerintah Kota Medan

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah kota Medan diukur dengan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012-2016.
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah kota Medan diukur rasio kemandirian pada tahun 2012-2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2012-2016.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi ketercapaian keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi peneliti berikutnya

Memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembandingan terhadap peneliti akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Mardismo (2009). “Kinerja merupakan konsep yang didalamnya tercakup memiliki arti yang beragam, untuk audien yang berbeda, dan konteks yang berbeda, akibatnya desain indikator kinerja bagi organisasi swasta dan sektor publik menjadi sulit.

“Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu menejer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Menurut Mardiasmo (2009 hal 269). Dalam penelitian ini istilah yang penulis maksudkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi penerimaan dan belanja dengan menggunakan

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undang selama satu perioda anggaran. bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain meliputi penapatan rasio keuangan. rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur lainnya. suatu rasio tersebut diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasi perusahaan dan kinerjanya.

b. Pengertian Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. sedangkan pada pasal 4 PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah

daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan ,melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

c. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah merupakan sub tansi daei sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2008, hal 18) “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

Menurut Abdul Halim (2008, Hal 20) “Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah”. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN).

d. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau yang dsering disebut bendaharaan. dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusutan APBD Tahun Anggaran 2007 mengatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisien dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”.

Menurut Halim (2007,hal 330) “Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang gterdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah”.

Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Pengetian APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di

daerah, didanai dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Abdul Halim (2008; hal. 15). “APBD adalah Suatu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (grondsleg) penetapan anggaran, dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU No 5 tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan penerimaan sumber-sumber pemerintah daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era Orde Baru menurut Abdul Halim (2007 hal 16)

(2) Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut:

(a) Pendapatan Daerah

Penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak

pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. dan konteks pendapatan daerah, dari format LRA diatas dapat dilihat bahwa pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan transfer lainnya dari pemerintah serta dari pendapatan lainnya yang sah. menurut Mardiasmo (2013,hal 189).

(b) Belanja Daerah

“Menurut Mardismo (2013,hal 190) Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

(c) Pembiayaan daerah

“Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan. Menurut Mardismo(2013, hal 191).

f. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang. salah satu menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan

dilaksanakannya. Menurut Halim (2007 hal 126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. mengukur efektivitas dan efisiensi dan merealisasikan pendapatan daerah.
3. mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

g. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori blum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektifitas, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuanagn dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. selain itu dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lainnya

yang terdekat maupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya.

Analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrove dalam bukunya, “Publik Finance In Theori and Practice”. namun dalam penerapannya disesuaikan dengan kemampuan APBD. Menurut Abdul Halim (2012, hal 128) menyatakan beberapa rasio keuangan yang juga dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, rasio kemandirian, rasio efektifitas , rasio keserasian, debt service converage ratio dan pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dalam meningkatkan keberhasilannya yang telah tercapai dari periode-periode berikutnya.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Suprianto (2007) rasio-rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah yaitu, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Daerah, dan Rasio Desentralisasi.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas keuangan daerah menggambarkan ×Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang dirancang, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas keuangan daerah:

$$\text{EKD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Depertemen dalam negeri dengan kepmendagri No. 69.900-327, tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom kedalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	0% - 60%

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327,1996

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat dalam konteks otonomo daerah biasa dalam bentuk Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. berikut rumus untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan keuntungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian(%)
Rendah Sekali	0,00 -25%
Rendah	25% -50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : tim litbang depdagri – fisipol ugm, 1991

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan pemerintah pusat semakin berkurang, meningkatnya daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dori Saputra, skripsi (2004)	Analisis Kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera barat	Secara rata-rata rasio kemandirian rendah sekali karena berada pada 0%-25% dan tren kemandirian keuangan daerah menandakan cenderung menurun berada pada 95,3% kurang dari 100%. kemudian untuk rasio efektivitas sangat efektif karena berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dan tren efektivitas cenderung naik berada diatas 100%.

2	Ayu febriyanti puspita sari, skripsi (2012)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Malang	Rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuanagn adalah baik. pola hubungan kemandirian daerah kota malang dalam 5 tahun berakhir masih menunjukkan pola hubungan istruk dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.
3	Anggi milintha cahya, skripsi (2010)	Analisis rasio efektivitas keuangan pengaruhnya terhadap pemerintah daerah	Rasio efektivitas keuangan pada kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan searah. artinya jika rasio efektivitas keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik.
4	Amin Rahmawati jurnal vol (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2012-2013	Secara rata-rata rasio kemandirian sukoharjo mengalami peningkatan yaitu,11,37% pada tahun 2011 17,21% pada tahun 2012 dan 17,36 pada tahun 2013 tetapi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.
5	Heri Triyono Jurnal vol (2011)	Analisi rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten sukoharjo APBD 2009-2011	Berdasarkan rasio kemandirian dapat diketahui tingkat rasio kemandirian tahun 2009 sebesar 7,11% dan mengalami peningkatan sebesar 1,65% pada tahun 2010 dengan kemandirian 8,76% pada tahun 2010 mengalami 1,7% dari tahun sebelumnya dengan tingkat kemandirian sebesar 10,46% dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian kabupaten sekoharjo tahun 2009-2011 berada pada tingkat kemandirian dengan internal 0%-25%

B. Kerangka Berfikir

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektifif, transparan dan bertanggungjawab. pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, pasal 4)

Salah satu aspek dari pemerintah daerah harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa- masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio

keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada daerah berupa perhitungan APBD. (Halim,2012:212)

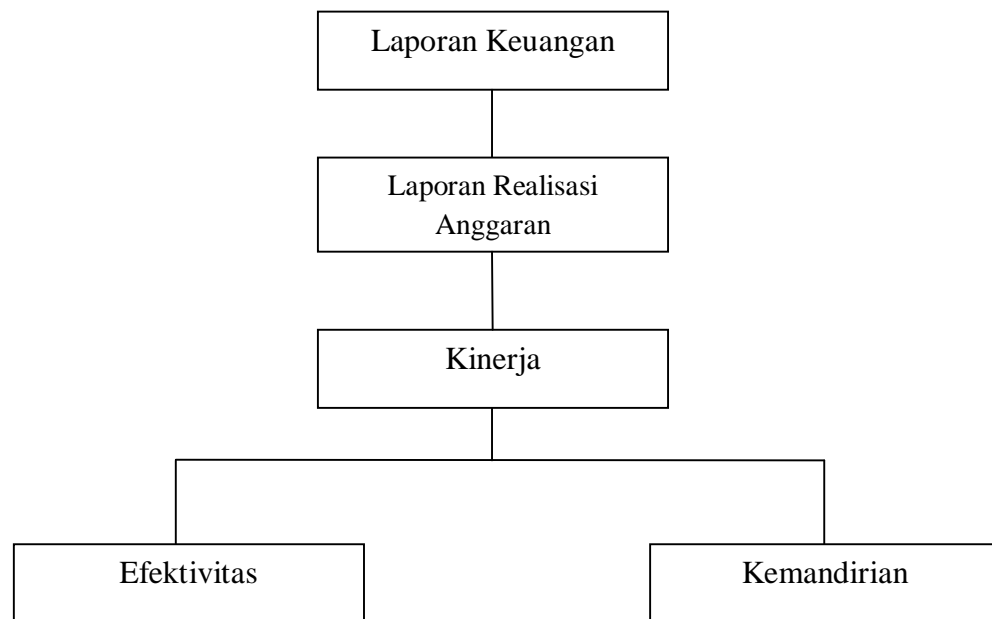
Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan belanja modal/pembangunan.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran . penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio diantaranya rasio kemandirian dan rasio efektivitas

Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada daerah otonom, dikatakan efektif jika mencapai 100% namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio kemandirian dilakukan karena dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren. semakin tinggi rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Apabila digambarkan dengan skema, maka penelitian membuat kerangka berfikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menyusun, mengkalifikasikan, menafsirkan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Memberikan gambaran tentang kontribusi pendapatan negara (pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak) selain hibah jumlah total pendapatan pemerintah pusat. Mahmudi (2010, hal, 249) rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{EKD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi rill}} \times 100$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Desember s/d Maret 2018.

D. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

Menurut Umar (2001) Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu

fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data cross section adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran yaitu dengan mempelajari, mengamati dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Data Kualitatif

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah berupa kualitatif berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumentasi yaitu Kantor Pemerintahan Kota Medan yang di peroleh penelitian secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab pada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif merupakan teknik analisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor Pemerintah Kota Medan
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah kota Medan.
4. Menganalisis data perhitungan rasio efektivitas dan rasio kemandirian
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan yang menggunakan rasio efektivitas dan rasio kemandirian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di provinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota atau negara yang lebih maju seperti pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar. hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional nasional.

2. Deskripsi Data

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana

kecenderungan yang terjadi. dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas keuangan daerah, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, dan dapat mengukur masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan anggaran penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Medan pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Data Keuangan Daerah Kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)
2012	2.998.203.912.475	4.034.121.333.860
2013	3.276.344.285.159	4.106.900.462.377
2014	4.042.115.828.231	4.560.412.529.543
2015	4.182.763.354.874	5.046.111.839.162
2016	4.308.116.916.024	5.490.162.683.364

Sumber : Laporan keuangan realisasi anggaran

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 2.998.203.912.475}}{\text{Rp4.034.121.333.860}} \times 100\%$$

$$= 74,3\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 3.276.344.285.159}}{\text{Rp4.106.900.462.377}} \times 100\%$$

$$= 79,8\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 4.042.115.828.231}}{\text{Rp4.560.412.529.543}} \times 100\%$$

$$= 88,6\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 4.259.044.490.715}}{\text{Rp. 5.046.111.839.162}} \times 100\%$$

$$= 82,8\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 4.308.116.916.024}}{\text{Rp. 5.490.162.683.364}} \times 100\%$$

$$= 78,8\%$$

Dapat dilihat dari hasil perhitungan pada rasio efektivitas diatas rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan. untuk tahun 2012 rasio efektivitas sebesar 74,3%, tahun 2013 sebesar 79,8% dan tahun 2014 sebesar 88,6% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena masih dibawah 100%. sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 82,8% dan 78,5% tetapi juga masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena masih berada dibawah 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami

penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah total pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Kota Medan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Data Keuangan Daerah Kota Medan
Tahun 2012-2016

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)
2012	1.147.901.461.607	1.822.682.350.868
2013	1.206.169.709.147	2.060.845.776.012
2014	1.384.246.114.729	2.657.869.713502
2015	1.489.723.189.088	2.769.321.301.626
2016	1.535.309.574.014	2.772.807.342.010

Sumber : Data Laporan Keuangan Realisasi Anggaran

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 1.147.901.461.607}}{\text{Rp. 1.822.682.350.868}} \times 100\%$$

= 62,9%

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 1.206.169.709.147}}{\text{Rp. 2.060.845.776.012}} \times 100\%$$

= 58,5%

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 1.384.246.114.729}}{\text{Rp. 2.657.869.713.502}} \times 100\%$$

= 50,1%

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 1.489.723.189.088}}{\text{Rp. 2.769.321.301.626}} \times 100\%$$

= 50,7%

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 1.535.309.574.014}}{\text{Rp. 2.772.807.342.010}} \times 100\%$$

= 55,3%

Dilihat dari hasil perhitungan diatas, maka untuk Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana tahun 2012 rasio kemandirian sebesar 62,9%, yang termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada diantara 50% dan 75% , untuk tahun 2013 mengalami penurunan nilai rasio sebesar 58,5% juga termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada antara 50% dan 75% tahun 2014 dan 2015 Rasio Kemandirian kembali mengalami penurunan menjadi 50,1% dan 50,7% yang juga termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 55,3% yang juga termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 50% dan 75%.

Penurunan yang terjadi pada tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Medan, yang artinya Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Medan dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren masih sangat tinggi. daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah.

B. Pembahasan

1. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu

dilaksanakan meskipun kaidah perakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. beberapa rasio yang dapat diteliti berdasarkan data keuangan yaitu: Rasio Efektivitas keuangan daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

a. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2002) rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah.

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.1, berdasarkan tabel tersebut maka terlihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 74,3% angka ini berdasarkan kriteria yang ada dinyatakan belum efektif, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 79,8% dan 88,6% berdasarkan kriteria masih juga belum efektif karena masih berada dibawah 100%. akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 nilai rasio keuangan daerah mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 82,8% dan tahun 2016 sebesar 78,5% berdasarkan kriteria belum efektif karena masih berada dibawah 100%. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio Efektivitas Keuangan Daerah untuk tahun 2012-2016 mengalami penurunan.

Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. dari data yang dimiliki ternyata upaya untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah itu

tidak tercapai dimana yang dianggarkan sebesar 1.087.999.279.770 tetapi yang tercapai hanya 892.674.245.233, dan upaya untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah daerah itu tidak tercapai dimana yang dianggarkan sebesar 196.672.893.585 tetapi yang tercapai hanya 117.607.258.270. hal ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan lain lain yang sah tidak maksimal. Menurut Mardismo (2013) Rasio Efektivitas kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang dirancang, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Anggi Malintha Cahya (2010) pada Kabupaten Tasikmalaya. penelitian ini menggunakan rasio efektivitas keuangan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas Keuangan pada Kabupaten Tasikmalaya belum efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memiliki hubungan (korelas) yang kuat dan searah.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.2, berdasarkan tabel tersebut maka terlihat kemandirian daerah Kota Medan pada tahun 2012-2016 tidak terus mengalami peningkatan. pada tahun 2012 dan 2013 nilai rasio sebesar 62,9% dan 58,5% angka ini berdasarkan kriteria yang ada dinyatakan sedang. Kemudian untuk tahun 2014 nilai rasio sebesar 50,7% dan menurun pada tahun 2015 menjadi 50,1% angka ini berdasarkan kriteria yang ada

dikategorikan rendah. dan tahun 2016 mengalami peningkatan dengan nilai rasio sebesar 55,3% dan angka ini berdasarkan kriteria yang ada dinyatakan rendah.

Berdasarkan penjelasan dapat dilihat bahwa Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian selama 5 tahun mulai dari tahun 2012-2016 masih rendah setiap tahunnya dan akan sangat mempersulit pemerintah dalam membiayai segala kegiatan operasional.

Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah kota medan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan pemerintah pusat. jadi kemandirian pemerintah kota medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi dan pemerintah kota medan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. dan dari data yang dimiliki ternyata upaya untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan itu tidak tercapai yang dianggarkan sebesar 1.691.495.158.660 tetapi yang tercapai hanya 1.598.113.512.931.

Menurut Halim (2008) semakin rendah tingkat rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin tinggi.

Berdasarkan pertumbuhan kemandirian keuangan daerah yang cenderung rendah selama 5 tahun, terlihat Pemerintah Kota Medan menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pihak ekstern. Pemerintah

Daerah dalam mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang ditetapkan. dalam hal ini, untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundang yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan netralisasi dan lembaga yang terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, selain itu juga pemerintah daerah kota medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat.
2. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan daerah kota medan bergantung dengan pemerintah pusat. sedangkan untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstren dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2008), *Akuntansi sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.*
- Amin Rahmawati (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2012-2013* . Jurnal Sukoharjo.
- Anggi Maliantha Cahya (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Ayu Febrianti Puspitasari (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2012*. Skripsi Akuntansi Malang.
- Dori Saputra (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negeri Padang.
- Evi Ica Krisnawati (2007). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu*. Skripsi.
- Gusti Agung (2011). *Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.*
- Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik –Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat.*
- Heri Triyono (2011) *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD. 2009-2011*. Jurnal Sukoharjo.
- Mardismo (2013) *Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat.*
- Muindro Renyowijoyo (2008). *Akuntansi Sektor Publik . Organisasi Non Laba Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriant 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negeri Gorontalo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004